

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tuntutan masyarakat kepada pemerintahan adalah dihasilkannya laporan keuangan yang telah memenuhi keempat karakteristik kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu alat pertanggungjawaban atas kinerja keuangan manajemen suatu pemerintahan kepada publik yang dipercayakan kepadanya. Informasi dalam laporan keuangan banyak dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Pihak-pihak tersebut menggunakan informasi yang terdapat dalam laporan keuangan untuk mengambil suatu keputusan. Keputusan yang dihasilkan diharapkan dapat membawa pemerintahan ke arah yang lebih baik.

Bagi pemerintah daerah menjadi suatu keharusan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tertib administrasi dan taat asas. Indikator bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sudah berkualitas yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Mardiasmo, 2021).

Otonomi daerah juga memberikan kebebasan kepada daerah otonom untuk menangani kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan prakarsanya sendiri berdasarkan keinginan masyarakat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sabarno (2008) menjelaskan bahwa dengan mendelegasikan kewenangan yang proporsional, aktual, dan bertanggung jawab kepada daerah yang dicapai dengan membatasi, membagi, dan menggunakan kekuasaan nasional yang adil, otonomi daerah dapat dilaksanakan. Hal ini

dilakukan dengan menjaga keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah. Seiring dengan pengalihan kewenangan tersebut, sumber daya seperti uang, bangunan, dan infrastruktur, serta manusia, juga dialihkan sesuai dengan tuntutan daerah dan kesejahteraan masyarakat daerah tersebut.

Tantangan yang dihadapi oleh pemerintah daerah dituntut mengembangkan dan memanfaatkan perkembangan teknologi dan sistem informasi untuk memperkuat kapasitasnya dalam mengelola keuangan daerah dan menyebarkan informasi keuangan daerah kepada masyarakat, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2005 tentang sistem informasi Keuangan Daerah. Penggunaan perangkat lunak sebagai alat dalam sistem akuntansi dan keuangan lokal adalah salah satu cara pemanfaatan teknologi informasi. Oleh karena itu, diperlukan sistem pengelolaan keuangan yang baik agar pengelolaan uang daerah dapat dilakukan secara akurat, cepat, transparan, dan bertanggung jawab.

Sistem informasi manajemen merupakan sebuah sistem yang komprehensif dan bertujuan untuk menyajikan lebih banyak informasi daripada informasi akuntansi historis (Widjayanto, 2001). Tingkat efisiensi kerja akan meningkat dengan adanya sistem informasi manajemen yang selalu menggunakan teknologi pengolahan data elektronik. Sistem informasi manajemen juga dapat menyampaikan semua output yang dihasilkan oleh setiap subsistem, yang kemudian digabungkan untuk menciptakan informasi yang dibutuhkan manajemen untuk membuat keputusan.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan yaitu Kompetensi Sumber Daya Manusia, yaitu kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsifungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya

secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*) (Ariani, 2013).

Keputusan yang dihasilkan diharapkan dapat membawa pemerintahan ke arah yang lebih baik. Bagi pemerintah daerah menjadi suatu keharusan untuk menyusun laporan keuangan yang berkualitas. Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah mencerminkan tertib pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yang mencakup tertib administrasi dan taat asas. Indikator bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sudah berkualitas yaitu opini Wajar Tanpa Pengecualian yang diberikan Badan Pemeriksa Keuangan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Adhi dan Suhardjo, 2013).

Organisasi-organisasi di sektor publik, khususnya yang pemerintah, berkewajiban untuk membuat laporan keuangan mereka tersedia untuk publik. Keberhasilan pembangunan disuatu daerah didorong dan difasilitasi oleh pemerintah, sebuah lembaga sektor publik yang menawarkan pelayanan kepada masyarakat (Handayani, 2010). Tujuan pelaporan keuangan untuk sektor publik adalah memberikan data tentang sumber daya keuangan, distribusinya, dan pemanfaatannya. Menjelaskan metode entitas untuk mendanai operasinya dan memenuhi kebutuhan kasnya. Memberikan data yang dapat digunakan untuk menilai kapasitas perusahaan untuk membiayai operasinya dan memenuhi komitmennya, memberikan rincian tentang situasi keuangan perusahaan dan setiap perubahan yang terjadi, menawarkan data umum yang membantu dalam menilai seberapa baik kinerja organisasi dalam hal biaya layanan, efisiensi, dan pencapaian tujuan (Bastian, 2001).

Permasalahan yang lain adalah dalam perhitungan surat pertanggungjawaban bendahara pada Dinas Pemerintahan Kabupaten

Bangkalan tahun 2020 dapat dilihat jumlah penerimaan pada kolom SPJ UP/GU/TU (Surat Pertanggungjawaban, Uang Persediaan, Ganti Uang, Tambahan Uang) sebesar Rp. 1.463.338.562, - sedangkan jumlah pengeluaran pada kolom tersebut Rp. 1.634.545.666, -. Maka dalam perhitungan pada SPJ UP/GU/TU Tahun 2020 terdapat defisit sebesar Rp. 178.027.304,-. Hal ini bisa terjadi karena dampak dari realisasi kegiatan di tahun lalu yang tidak selesai sehingga kegiatan itu harus dilanjutkan di tahun berikutnya dengan anggaran tahun tersebut yang kemudian akan menambah pengeluaran. Seharusnya menurut kaidah dalam suatu usaha jumlah penerimaan haruslah lebih besar dari pada pengeluarannya. Sama halnya dengan pelaporan keuangan pemerintah, jika jumlah penerimaan lebih kecil dari pada mengeluarkan maka akan berdampak defisit anggaran yang harus ditutupi.

Penggunaan Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan langkah utama dalam meningkatkan kualitas pelaporan keuangan (SAP). Diharapkan bahwa pemerintah daerah akan selalu mengikuti norma-norma yang ditentukan saat menyusun laporan keuangan mereka. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 yang kemudian diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, diterbitkan Pemerintah sebagai jawaban atas amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (SAP). Standar akuntansi harus diikuti saat menyusun dan menyajikan laporan keuangan untuk pemerintah pusat dan daerah, menurut SAP.

Pada tanggal 29 Agustus 2006, Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) diresmikan. BPKP membuat program aplikasi ini untuk membantu pengelolaan keuangan daerah tingkat SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah). Pemerintah daerah diharapkan mendapatkan keuntungan yang lebih besar dari memiliki program aplikasi ini ketika menerapkan pengelolaan keuangan daerah.

Dengan memanfaatkan teknologi, aplikasi SIMDA dapat digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terpadu, meliputi penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pertanggungjawaban keuangan. Menurut Alfian (2015) menjelaskan bahwa Penerapan SIMDA oleh SKPD belum mampu membantu Pemerintah Daerah mencapai tujuan organisasinya karena SIMDA belum dimanfaatkan secara maksimal.

Sistem pengendalian internal pemerintah merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah adalah sistem pengendalian internal yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Menurut Mulyadi (2001:163) sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijaksanaan manajemen.

Tujuan Sistem Pengendalian Internal (SPI) menurut Warren et al (2005) salah satunya adalah untuk mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Dengan sistem akuntansi, resiko terjadinya kekeliruan dan kesalahan pencatatan atau perhitungan dapat diminimalisasi sehingga mengurangi kemungkinan pemerintah daerah mengalami kekeliruan. Suatu sistem yang berkualitas, dirancang, dibangun dan dapat bekerja dengan baik apabila bagian-bagian yang terintegrasi dengan sistem tersebut beroperasi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Salah satu bagian di dalam sistem informasi akuntansi tersebut adalah pengendalian internal.

Adapun opini yang diberikan oleh BPK atas laporannya dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hal ini mengidentifikasi bahwa

kinerja keuangan pada Pemerintah Kabupaten Bangkalan perlu ada penyempurnaan sehingga mengarah pada rasio standar sebagai sebuah standar didalam penyajian pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Dari kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa penggunaan aplikasi SIMDA dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan dengan mempermudah penyajian laporan keuangan yang efektif, tepat waktu, dan transparan. Menurut penelitian Mohune (2013), penggunaan sistem informasi daerah dan hasil pengujian hipotesis Karena program SIMDA adalah alat yang bagus untuk pengelolaan keuangan daerah, koefisien positif ini menunjukkan bahwa SIMDA memiliki pengaruh yang positif terhadap kualitas pelaporan keuangan

Pemerintah Kabupaten Bangkalan merupakan salah satu pemerintah daerah yang menghasilkan laporan keuangan dengan menggunakan aplikasi SIMDA yang disediakan oleh BPKP untuk pengelolaan keuangan daerah. Laporan keuangan dibuat untuk menyediakan informasi yang relevan, dapat dipercaya, dapat dihubungkan, dan dapat dipahami. Setiap tahun, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) akan melakukan opini audit atas laporan keuangan pemerintah daerah atas nama pemerintah.

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengambil judul **“Pengaruh Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan?
2. Apakah penerapan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan?

1.3 Tujuan Penelitian

Kegiatan penelitian skripsi ini merupakan kegiatan yang harus ditempuh setiap mahasiswa di Universitas Trunojoyo Madura. Tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini yaitu, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan.
2. Untuk mengetahui penerapan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Bangkalan.

1.4 Manfaat Penelitian

Melalui hasil penelitian yang telah dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terkait, sebagai berikut:

1. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi penelitian dimasa yang akan datang berkaitan dengan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.